

# LAPORAN TAHUNAN

BADAN PENGELOLA PAJAK  
DAN RETRIBUSI DAERAH  
KOTA JAMBI  
TAHUN 2025

## KATA PENGANTAR

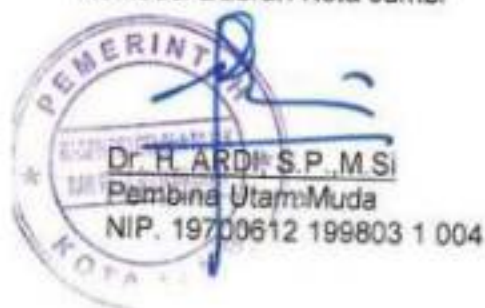
Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat-Nya penyusunan Laporan Tahunan SKPD Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2025 dapat terselesaikan pada waktunya.

Guna mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah berkewajiban melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan materi utama penyusunannya adalah Laporan Tahunan yang disusun oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan urusan kewenangannya, sebagai wujud pertanggungjawaban kegiatan selama tahun Anggaran 2025 pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.

Selain itu diharapkan Laporan Tahunan ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan pedoman kegiatan di tahun mendatang. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh bagian yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan laporan tahunan ini. Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu kami mohon saran dan kritik yang membangun demi tersusunnya laporan tahunan yang akan datang.

Jambi, Januari 2026

Kepala Badan Pengelola Pajak dan  
Retribusi Daerah Kota Jambi



Dr. H. ARDI S.P., M.Si  
Pembina Utam Muda  
NIP. 19700612 199803 1 004

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Laporan Tahunan sebagai bentuk laporan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi sebagai salah satu akuntabilitas kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Jambi yang menyelenggarakan tugas pada bidang Pendapatan Pajak Daerah atas penggunaan anggaran belanja daerah yang telah dialokasikan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.

Penyusunan Laporan Tahunan ini, sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan amanat dalam rangka pencapaian misi yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebagai wujud komitmen kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Walikota Jambi dalam meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja dalam pencapaian target.

Laporan Tahunan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas apa yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai bagian dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ) guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik ( good governance ) di Indonesia.

Melalui penyusunan Laporan Tahunan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan informasi-Informasi yaitu sebagai berikut :

- (1) Sebagai bahan evaluasi berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi pada bidang Keuangan;
- (2) Menginformasikan atas pencapaian target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja kepada pemberi mandat dalam hal ini adalah Wali Kota Jambi.

## 1.2 Dasar Hukum

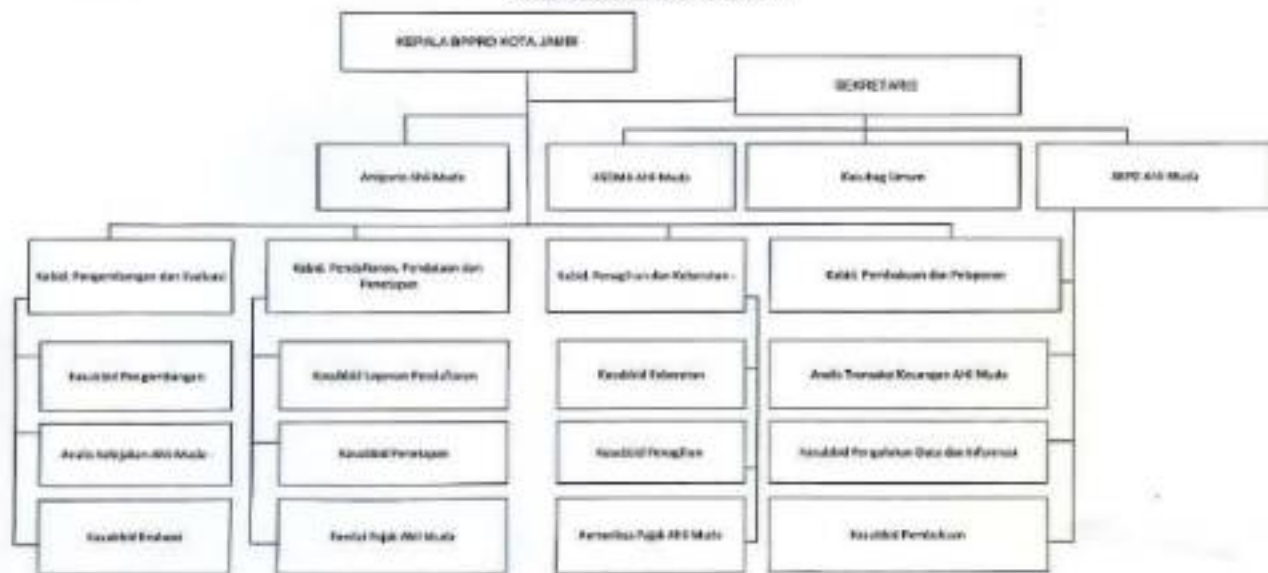
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Nomor 55) Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Dan Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Penetapan Urusan Pemerintahah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Jambi Tahun 2008 nomor 07);
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2025 Nomor 3);
10. Peraturan Walikota Jambi Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Darah Kota Jambi.

### **1.3 Gambaran Umum Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.**

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI DPRD 2025



Adapun tugas pokok Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan pajak daerah dan tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi mempunyai fungsi yaitu :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pendapatan perpajakan daerah dan retribusi daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan pajak daerah;
- d. Pelaksanaan penagihan pajak daerah dan penyelesaian piutang, keberatan, pemeriksaan pajak daerah, pengendalian dan penindakan;
- e. Pelaksanaan pembukuan, pelaporan, pengolahan data dan informasi pajak daerah dan retribusi daerah berbasis sistem;
- f. Pelaksanaan pengembangan dan perencanaan program pajak daerah dan pengkajian peraturan perpajakan daerah, pembinaan terhadap wajib pajak daerah, evaluasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait untuk peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi didukung oleh :

- a. Kepala Badan ;
- b. Sekretariat,

Tugas Pokok

Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan urusan umum, kepegawaian dan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum ;
2. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur ;
3. Analis Keuangan Pusat dan Daerah ;

c. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan,  
Tugas Pokok

Membantu kepala badan dalam melaksanakan urusan layanan pendaftaran, pendataan dan penilaian dan penetapan pajak daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

terdiri dari :

1. Sub Bidang Layanan Pendaftaran ;
2. Penilai Pajak ;
3. Sub Bidang Penetapan ;

d. Bidang Penagihan dan Keberatan,  
Tugas Pokok

Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan urusan penagihan dan Penyelesaian Piutang, keberatan dan pemeriksaan dan penindakan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

terdiri dari :

1. Sub Bidang Penagihan ;
2. Sub Bidang Keberatan ;
3. Pemeriksa Pajak ;

e. Bidang Pembukuan dan Pelaporan,  
Tugas Pokok

Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan urusan Pembukuan, Pelaporan dan Pengolahan Data dan Informasi Pajak dan Retribusi Daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

terdiri dari :

1. Sub Bidang Pembukuan ;
2. Analis Transaksi Keuangan ;
3. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi ;

f. Bidang Pengembangan dan Evaluasi  
Tugas Pokok

Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan urusan program perencanaan, pengkajian pajak daerah, penyuluhan dan evaluasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya.

terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengembangan ;
2. Analis Kebijakan ;
3. Sub Bidang Evaluasi ;

#### 1.4 Sumber Daya Manusia

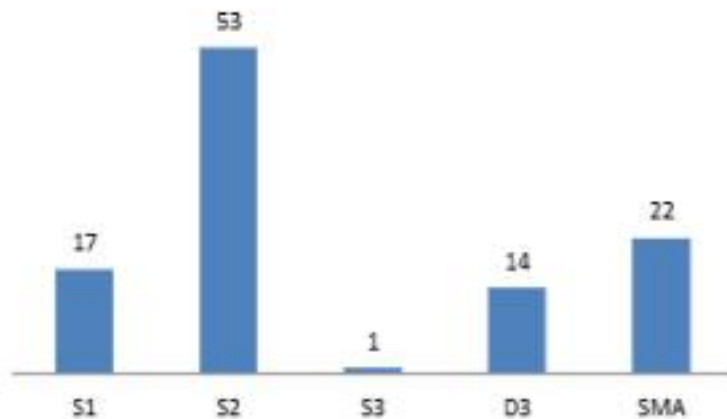
Sumber Daya Manusia (SDM) di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi merupakan elemen kunci yang menentukan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Memberikan layanan yang cepat, ramah dan profesional kepada wajib pajak serta pihak terkait, untuk menciptakan pengalaman pelayanan publik yang optimal berikut adalah gambaran SDM pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi :

**Grafik 1.1**  
**Komposisi Jumlah Pegawai BPPRD Kota Jambi Tahun 2025**



Jumlah Pegawai BPPRD pada Tahun 2025 adalah 107 orang yang terdiri dari 62 PNS atau 57,96 % dan 45 PPPK atau 42,05%, dari komposisi tersebut terbanyak pegawai pria yaitu 56 orang atau 52,34% dan wanita 51 orang atau 47,66%.

**Grafik 1.2**  
**Komposisi Pegawai BPPRD Berdasarkan Tingkat Pendidikan**



Sedangkan apabila dilihat dari jenjang pendidikan, komposisi tertinggi berpendidikan S1 sebanyak 54 orang atau 50,47%, komposisi terbanyak kedua 16 orang berpendidikan S2 atau 15,89 %, jenjang pendidikan tertinggi telah mencapai jenjang doktoral (S-3) sebanyak 1 orang 0,01% sedangkan pendidikan terendah adalah SMA sebanyak 22 orang atau 20,56%.

### **1.5 Keadaan Sarana Prasarana**

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi memiliki sarana dan prasarana pendukung sebagaimana terinci pada tabel berikut:

DAFTAR KONDISI ASET AKTIF LAPTOP, KOMPUTER DAN PERIPHERAL TAHUN 2025

DAFTAR INVENTARIS												
NO	JENIS BAHAN	TAHUN	JUMLAH	KONDISI	JENIS BAHAN	TAHUN	JUMLAH	KONDISI	JENIS BAHAN	TAHUN	JUMLAH	KONDISI
1	Laptop	2008	-	-	Komputer	2010	-	-	Printer	2008	1	Kurang Baik
		2007	-	-		2011	-	-		2007	2	Kurang Baik
		2010	1	Kurang Baik		2012	1	Kurang Baik		2010	-	-
		2011	2	Kurang Baik		2013	-	-		2011	-	-
		2012	1	Kurang Baik		2014	1	Kurang Baik		2012	-	-
		2013	5	Kurang Baik		2015	18	Kurang Baik		2013	1	Kurang Baik
		2014	9	Kurang Baik		2016	9	Kurang Baik		2014	5	Kurang Baik
		2015	3	Kurang Baik		2017	14	Kurang Baik		2015	3	Kurang Baik
		2016	2	Kurang Baik		2018	2	Kurang Baik		2016	3	Kurang Baik
		2017	4	Baik		2019	8	Baik		2017	8	Kurang Baik
		2018	2	Baik		2020	4	Baik		2018	10	Baik
		2019	4	Baik		2021	6	Baik		2019	9	Baik
		2020	-	-		2022	3	Baik		2020	7	Baik
		2021	1	Baik		2021	-	-		2021	-	-
		2022	-	-		2022	7	Baik		2022	4	Baik
		2023	2	Baik		2023	7	Baik		2023	7	Baik
		2024	8	Baik		2024	4	Baik		2024	8	Baik
		2025	8	Baik		2025	4	Baik		2025	8	Baik
	<b>TOTAL</b>		<b>83</b>		<b>TOTAL</b>		<b>84</b>		<b>TOTAL</b>		<b>83</b>	

No	Uraian	Bekas	Kurang Baik		Jumlah
			Demas Habis	Musak Detail	
1	Laptop	30	56	6	92
2	Komputer	38	36	10	84
3	Printer	48	14	23	85

Perbaikan:

Laptop Kurang Baik sebanyak 23 Perbaikan Tahun 2010 s.d 2018

Komputer Kurang Baik sebanyak 45 unit Perbaikan Tahun 2012 s.d 2018

Printer Kurang Baik sebanyak 37 Perbaikan Tahun 2008 s.d 2017,2024

DAFTAR KONDISI ASSET AKIF- AC dan CCTV TAHUN 2025

BARANG (KONDISI)								
NO.	JENIS BARANG	TAHUN	JUMLAH	KONDISI	JENIS BARANG	TAHUN	JUMLAH	KONDISI
1	AC	2013	1	Kurang Baik	CCTV	2013		
		2014	5	Kurang Baik		2014		
		2015	2	Kurang Baik		2015		
		2016	4	Kurang Baik		2016		
		2017	5	Kurang Baik		2017	1	Kurang Baik
		2018	7	Baik		2018		
		2019	1	Baik		2019	1	Kurang Baik
		2020	-	-		2020		
		2021	4	Baik		2021		
		2022	1	Baik		2022	1	
		2023	-	-		2023	-	
		2024	15	Baik		2024	-	
		2025	3	Baik				
		<b>Jumlah</b>	<b>31</b>			<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	

No.	Unitas	Bak	Kurang Baik		Jumlah
			Berus Fungsinya	Musak Demat	
1	AC	31	12	5	17
2	CCTV	1	2		3

AC Kurang Baik Sebanyak 20 Unit Pembelian Tahun 2013 s/d 2017

CCTV Kurang Baik Sebanyak 2 Unit Pembelian 2017 dan 2019

DAFTAR KONDISI ASSET KENDARAAN TAHUN 2025

DAFTAR INVENTARI												
NO	JENIS BAHANG	TAHUN	JUMLAH	KONDISI	JENIS BAHANG	TAHUN	JUMLAH	KONDISI	JENIS BAHANG	TAHUN	JUMLAH	KONDISI
1	Roda 8	12	1	Baik	Roda 4	2015	1	Kuning/Baik	Roda 2	2010	1	1 Lelang
						2014	2	Baik		2013	3	1 Kuning Baik, 2 Lelang
						2013	2	Baik		2014	2	3 Kuning Baik, 2 Lelang
						2016	2	1 Baik, 1 Lelang		2019	1	
						2017	1	Baik		2022	2	
						2021	2	Baik				
						2022	8	Baik				
	Jumlah		1		Jumlah		16		Jumlah		18	

No	Linien	Baik	Kuning/Baik	Alasan Lelang	Jumlah
1	Roda 8	1			1
2	Roda 4	14	1	1	16
3	Roda 2	9	4	5	18

Kendaraan Roda 4 Tahun 2015 sebanyak 1 unit dan Kendaraan Roda 2 Tahun 2010 s.d 2014 sebanyak 5 unit telah diserahkan ke bagian aset kota jambi untuk proses pelelangan.

Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang sekretariat, ruang arsip, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filing cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran, dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah cukup memadai.

## **1.5 Maksud dan Tujuan Penyusunan laporan**

### **Maksud**

Maksud penyusunan Laporan Tahunan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi tahun 2025 adalah untuk memberikan arah, menjadi standar kerja, memberikan kerangka pemersatu dan membantu perkiraan peluang-peluang terhadap aktivitas dan keputusan manajerial Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi tahun 2025.

### **Tujuan**

1. Meningkatnya sarana dan prasarana gedung, ruang, dan peralatan kerja.
2. Meningkatnya sistem perencanaan, pelaporan yang dapat dipertanggung jawabkan
3. Mendorong Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
4. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi untuk meningkatkan kinerjanya

## **1.6 Sistematika Penyusunan Laporan Tahunan**

Untuk menggambarkan akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi, Laporan Tahunan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi disusun dengan sistematika sebagai berikut :

## **KATA PENGANTAR**

## **DAFTAR ISI**

## **BAB I PENDAHULUAN**

BAB I Menguraikan tentang Latar belakang, dasar hukum, gambaran umum, tugas pokok dan fungsi, sumber daya manusia, aset Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, maksud, tujuan dan sistematika penulisan.

## **BAB II TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH**

Menguraikan tentang Indikator dan target indikator, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan perangkat daerah, target indikator program dan kegiatan program tahun 2025, dan Perjanjian Kerja kepala OPD tahun 2025.

## **BAB III REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN 2025**

Menguraikan tentang strategi dan kebijakan pendapatan, permasalahan dan solusi pengelolaan pendapatan, target dan realisasi belanja langsung dan belanja langsung.

## **BAB IV CAPAIAN DAN HASIL**

Menguraikan tentang realisasi indikator kinerja maupun anggaran, menjelaskan hal-hal yang menjadi prestasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.

## **BAB V PENUTUP**

Menjelaskan tentang penutupan Laporan Tahunan yang menggambarkan hasil kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi yang dirangkum dalam kesimpulan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja.

## BAB II

### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1 Indikator dan Target Indikator

Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan Unit Kerja.

Indikator-indikator yang digunakan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Target Kinerja			
			2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Tujuan Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indikator Tujuan Indeks Reformasi Birokrasi				
2	Sasaran Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Indikator Sasaran Realisasi PAD dan Sektor Pajak dan Retribusi Daerah	345.000.000.000	330.056.169.249	466.574.801.314	484.398.421.573

## 2.2 Tujuan dan Sasaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah KotaJambi

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi dan kebijakan pembangunan.

Gambaran mengenai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2024 - 2025 dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini:

**Tabel 2.2**  
**Keterkaitan Urusan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah**  
**Dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2025**

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumusan	Target sasaran Hasil Pembangunan			
							2024		2025	
							Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Penguatan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Index Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Realisasi PAD dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah	Realisasi Penanaman Pajak Daerah	345.000.000.000	330.056.169.249	466.023.208.361	487.281.009.397

## **2.3 Strategi dan Kebijakan**

Untuk mewujudkan ketercapaian sasaran strategis sesuai dengan kurun waktu 2025-2029, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi memilih strategi melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan meliputi :

### **I. Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah**

1. Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah
6. Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

### **II. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.**

Kegiatan: Pengelolaan Pendapatan Daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran diatas, maka ditentukan beberapa strategi

**Tabel 2.3**  
**Tujuan, sasaran Strategi dan Kebijakan**  
**Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2029**

Visi Kota Jambi: Mewujudkan Kota Perdagangan Dan Jasa Yang Bersih, Aman, Harmonis, Agamis, Inovatif Dan Sejahtera			
Misi 3: Penguatan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik			
Tujuan	sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkan Realisasi Penerimaan dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan sosialisasi /penyuluhan terkait regulasi pajak daerah.</li> <li>2. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah.</li> <li>3. Meningkatkan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah berbasis teknologi informasi.</li> <li>4. Meningkatkan akuntabilitas pelaporan pajak dan retribusi daerah.</li> <li>5. Meningkatkan kualitas evaluasi penerimaan pajak dan retribusi daerah.</li> </ol>

## 2.4 Target Indikator Program dan Kegiatan Tahun 2025

Target indikator program dan kegiatan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4  
Target indikator program dan Kegiatan Tahun 2025

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Besaran/ Volume
(1)	(2)		(4)	(5)
I	<b>Program</b>	<b>Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Meningktanya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan</b>	<b>468.023.208.361</b>
	<b>Kegiatan:</b>	<b>Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Persentase Pertumbuhan Wajib Pajak dan retribusi daerah</b>	<b>9%</b>
	<b>Sub Kegiatan:</b>			
	1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen
	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokuman Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen
	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	6 Laporan
	4	Penyedia Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	16 Unit
	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan
	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan
	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	10.000 Objek pajak
	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen Ketetapan Pajak Daerah	33.000 Dokumen
	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	30.768 Layanan
	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan pajak daerah yang dilakukan Penelitian dan Verifikasi	33.000 Dokumen

	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen Hasil Pelaksanaan penagihan Pajak Daerah	3 Dokumen
	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen
	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Dokumen
	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan
<b>II</b>	<b>Program</b>	<b>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Indeks reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>
	<b>Kegiatan:</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Peningkatan Nilai AKIP</b>	<b>A</b>
	<b>Sub Kegiatan:</b>			
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen
	2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan
	<b>Kegiatan:</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu</b>	<b>100%</b>
	<b>Sub Kegiatan:</b>			
	1	Penyediaan Gaji Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang
	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	2 Laporan
	<b>Kegiatan:</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah</b>	<b>57,00</b>
	<b>Sub Kegiatan:</b>			
	1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapan	1 Paket
	2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	12 Orang

	3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang
<b>Kegiatan:</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Umum (RKBU)</b>	<b>100%</b>
<b>Sub Kegiatan:</b>				
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang disediakan	2 Paket
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Paket
	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	1 Paket
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket
	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen
	6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan
	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
<b>Kegiatan:</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>
<b>Sub Kegiatan:</b>				
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	4 Laporan
<b>Kegiatan</b>		<b>Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Peningkatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik (Layak Pakai)</b>	<b>100%</b>
<b>Sub Kegiatan</b>				
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya	37 Unit
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	101 Unit
	3	Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Unit

## **2. 5 Perjanjian Kinerja Kepala OPDTahun 2025**

PerjanjianKinerja suatu hal penting bagi Organisasi Perangkat Daerah karena merupakan wujud dari komitmen anggota organisasi terhadap tanggung jawabnya pada tahun berjalan untuk pencapaian tujuan organisasi. Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah juga merupakan komitmen Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi kepada Walikota Jambi, dan sekaligus sebagai komitmen Walikota Jambi terhadap masyarakat Kota Jambi.

Dengan adanya perjanjian kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2025 yang sudah diligalisasi oleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dengan Walikota Jambi, maka Kepala Badan akan fokus.

**TABEL 2.5**  
**CAKUPAN PERJANJIAN BADAN PENGELOLA PAJAK**  
**DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2025**

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Realisasi PAD dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah	468.023.208.361

NO	PROGRAM	ANGGARAN	PERSENTASE
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	27.370.324.031	80,63%
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	6.574.728.969	19,37%
	Jumlah	35.705.053.000	100%

### BAB III REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

#### 3.1 Pendapatan

Presentase pertumbuhan pendapatan daerah dipergunakan untuk menginformasikan kinerja pendapatan daerah pada tahun tertentu dengan pertumbuhan positif atau negatif. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi mempunyai pendapatan asli daerah yang dikelola yaitu pajak daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah, dengan demikian Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menghitung presentase pendapatan asli daerah.

Tahun 2025 anggaran pendapatan BPPRD sebelum perubahan pajak daerah sebesar Rp. 415.643.000.000 dan retribusi pemakaian kekayaan daerah (sewa panggung billboard) sebesar Rp. 0,- setelah perubahan pajak daerah sebesar Rp. 466.574.801.314,- Adapun rincian anggaran dan realisasi pendapatan sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Pajak Reklame	10,000,000,000	10,258,706,620	102.59%
2.	Pajak Air Tanah	4,650,000,000	4,659,719,126	100.21%
3.	PBBP2	32,115,801,314	33,402,542,472	104.01%
4.	BPHTB	76,000,000,000	83,727,702,743	110.17%
5.	PBJT	191,500,000,000	208,877,372,126	109.07%
6.	Opsen PKB	112,309,000,000	99,910,905,486	88.96%
7.	Opsen BBNKB	40,000,000,000	43,461,473,000	108.65%
8.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	1,448,407,047	2,982,617,824	205.92%
	<b>Total</b>	<b>468,023,208,361</b>	<b>487,281,039,397</b>	<b>104.11%</b>

#### 3.2 Belanja

Tahun 2025 anggaran belanja pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kota Jambi sebesar Rp. 33.945.053.000,-.

Anggaran belanja tersebut dialokasikan pada berbagai program –program dan kegiatan - kegiatan sebagai pendukung utama maupun bukan pendukung utama dalam pencapaian target Laporan Kinerja indikator kinerja per sasaran strategis untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Anggaran belanja yang dialokasikan tersebut terdiri dari anggaran belanja operasi dan belanja modal pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi sebesar sebagai berikut :

1. Belanja operasi semula sebesar Rp. 33.412.174.982-, setelah Anggaran Belanja Tambahan (ABT) menjadi sebesar Rp. 32.093.111.548,-.
2. Belanja Modal semula sebesar Rp. 457.956.018,- setelah Anggaran Belanja Tambahan (ABT) menjadi sebesar Rp. 1.851.941.452,-.

### 3.2.1 Belanja dan Realisasi Belanja Operasi

Belanja Operasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dapat dilihat pada table 3.2.1 dibawah, sebagai berikut :

**Tabel 3.2.1**  
Belanja Operasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah KotaJambi

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Belanja Operasi	32,093,111,548.00	26,527,060,675.00	82.66%
	Belanja Pegawai	23,715,942,341.00	19,801,288,793.00	83.49%
	Belanja Barang dan Jasa	8,377,169,207.00	6,725,771,882.00	80.29%
2	Belanja Modal	1,851,941,452.00	1,681,131,049.00	90.78%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,851,941,452.00	1,681,131,049.00	90.78%
	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	-	-	0.00%
	Total	33,945,053,000.00	28,208,191,724.00	83.10%

### 3.2.2 Belanja dan Realisasi

Anggaran belanja pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi tahun anggaran 2024 terdiri dari sebagai berikut Tabel

**Tabel 3.2.2**  
Anggaran dan Realisasi Belanja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN KEUANGAN	
			Rp.	%
1	2	3	4	5=(4/3)x100
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	27,370,324,031	22,863,181,816	83.53%
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	2,693,250	2,286,924	84.91%
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	1,367,520	961,584	70.32%

2	Evaluasi kinerja perangkat daerah	1,325,730	1,325,340	99.97%
<b>2</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>24,100,333,861</b>	<b>0,117,095,343</b>	<b>83.47%</b>
3	Penyediaan gaji dan tunjangan asn	23,715,942,341	19,801,972,913	83.50%
4	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan skpd	337,090,320	270,271,270	80.04%
5	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan/bulanan/triwulanan/semesteran skpd	46,701,200	44,851,180	96.04%
<b>3</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>279,884,000</b>	<b>228,872,135</b>	<b>81.77%</b>
6	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya	38,564,000	8,564,000	22.21%
7	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	241,320,000	220,308,135	91.29%
<b>4</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1,350,634,720</b>	<b>1,262,653,526</b>	<b>93.49%</b>
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	43,352,500	39,463,710	91.03%
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1,054,824,100	991,912,216	94.04%
10	Penyediaan bahan logistik kantor	27,711,150	26,474,000	95.54%
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	54,179,470	44,758,600	82.61%
12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	880,000	240,000	27.27%
13	Fasilitasi kunjungan tamu	19,687,500	9,805,000	49.80%
14	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	150,000,000	150,000,000	100.00%
<b>5</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>563,080,000</b>	<b>455,397,972</b>	<b>80.88%</b>
15	Penyediaan jasa surat menyurat	27,080,000	27,080,000	100.00%
16	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	536,000,000	428,317,972	79.91%
<b>6</b>	<b>Kegiatan PemeliharaanBarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1,073,698,200</b>	<b>796,875,916</b>	<b>74.22%</b>
17	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	679,075,200	472,088,874	69.52%
18	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	102,623,000	94,279,042	91.87%
19	Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	292,000,000	230,508,000	78.94%
<b>II</b>	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>6,574,728,969</b>	<b>5,345,694,028</b>	<b>81.31%</b>
<b>7</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>6,574,728,969</b>	<b>5,345,694,028</b>	<b>81.31%</b>
20	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	32,672,110	28,930,827	88.55%

21	Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah	40,345,057	39,093,156	96.90%
22	Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	706,992,695	380,377,638	53.80%
23	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	2,100,483,141	1,862,094,891	88.65%
24	Pendataan dan Pendaftaran objek pajak daerah	138,508,579	108,952,973	78.66%
25	Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	1,123,428,655	742,466,610	66.09%
26	Penilaian pajak dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	216,814,368.00	194,772,031	89.83%
27	Penetapan wajib pajak daerah	89,333,193	84,431,942	94.51%
28	Pelayanan dan konsultasi pajak daerah	305,850,802	252,803,665	82.66%
29	Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	36,080,229	32,780,280	90.85%
30	Penagihan pajak daerah	1,460,513,363	1,328,591,105	90.97%
31	Penyelesaian keberatan pajak daerah	50,542,458	44,495,531	88.04%
32	Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	247,502,698	222,196,135	89.78%
33	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah	25,681,605	23,705,194	92.30%
<b>J U M L A H</b>		<b>33,945,053,000</b>	<b>28,208,875,844</b>	<b>83.10%</b>

## **BAB IV**

### **CAPAIAN DAN HASIL**

#### **4.1 Realisasi Indikator Kinerja dan Anggaran**

Realisasi Indikator Kinerja meliputi Indikator Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi yang mengacu pada sasaran RPJMD, Indikator tujuan dan indikator sasaran dan realisasi kegiatan tahun 2025. (sebagaimana tabel terlampir).

#### **Realisasi Anggaran**

Rencana  
Kebijakan Energi dan Agribisnis  
Tahun 2024

NO	URUTAN PEMERINTAHAN	GPO DELANGSAHA	KEBLAKIAHAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		SEALUAS		PERINGKAT (100)	UPAYA PENYALINGAN/INISIASI	KENDIRI (100% LOKAL, 75% SWAS)	TANGGUNG JAWAB (100% LOKAL, 75% SWAS)
						Kwarta	Kumulatif	Tahun	Kumulatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Unitas Kecamatan	Daerah Perangin Pesisir dan Darul Ihsan Kota Jambi	1	Meningkatkan kualitas wilayah perikanan air tawar	Program Penguatan Struktur Pemertanian Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Daerah Perangin Pesisir	0	21.580.400.000	0	88,75%	22.074.708.000, 01		
1			2	Meningkatkan tingkat pengabdian dan pelayanan masyarakat perikanan air tawar	Bagian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Realisasi Nilai APBD	A	2.043.100	2441	A	2.290.404		
1			3	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat di bidang perikanan air tawar	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.301.500	2 Dokumen	70,37%	901.304	Siswa Daerah dan Nelayan Pagaragan	
2			4	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kualitas daerah di bidang perikanan air tawar	Tinjauan kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1.320.700	1 Laporan	50,00%	1.320.340		
2			5	Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan daerah	Bagian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan	100%	21.100.233.000	100%	83,07%	20.117.000.342		













											<p>beras yang tidak termasuk dalam kategori beras putih</p>	<p>dihasilkan dengan menggunakan teknologi digitalisasi pertanian</p>	<p>jenis beras yang sesuai dengan pola tanam di lahan sawah tadah air</p>	<p>jenis dihasilkannya dengan menggunakan teknologi digitalisasi pertanian</p>
6			<p>Pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan mesin dan alat pertanian</p>	<p>Jumlah mesin hasil pengalihan pemeliharaan dan perbaikan mesin dan alat pertanian</p>	12 Agustus	1.121.026.933	12 Agustus	66,88%	743.949.816	<p>alat pertanian dan hasil perbaikan dan pemeliharaan mesin dan alat pertanian</p>	<p>alat pertanian yang mendukung kegiatan pertanian</p>	<p>jenis beras yang sesuai dengan pola tanam di lahan sawah tadah air</p>	<p>jenis dihasilkannya dengan menggunakan teknologi digitalisasi pertanian</p>	

1				Finalisasi paper dan pengajuan permohonan pendanaan dan pencairan (PMPD) serta fase pencairan ke atas tanah dan bangunan	Jumlah tahap paper yang dilaksanakan KUPD-nya	10.000 Orde Paper	216.770.000	20.740 Orde Paper	66,80%	166.770.000			5) Untuk paper SPVTS diberikan insentif yang akan dari penerapannya sesuai dengan harga transaksi paper	5) E-Regulasi Pengajuan PMPD telah selesai dan paper Permohonan Danah KUPD JKD No. 2 Tahun 2021 tentang Paper Danah dan Danah
4				Finalisasi awal paper tanah	Jumlah dokumen lengkap paper tanah	22.000 Dokumen	68.222.193	22.000 Dokumen	61,51%	64.421.842			A) Menepatkan koordinasi antar Direktorat dalam mendukung pencapaian target dan penyelesaian dan fase penyelesaian penyelesaian dokumen	6) Danah serta Permohonan ke atas tanah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan PDR-Perumahan dan SPVTS untuk pengajuan SPVTS sesuai dengan harga transaksi
9				Telayakan dan formulir paper tanah	Jumlah Layahan dan formulir paper tanah	20.700 Layahan	300.000.000	20.770 Layahan	62,06%	302.803.000				
10				Finalisasi dan pencairan data pengajuan paper tanah	Jumlah data pencairan paper tanah yang telah selesai pencairan dan formulir	25.000 Dokumen	26.040.000	23.000 Dokumen	60,00%	20.700.000				
11				Penyediaan paper tanah	Jumlah dokumen hasil penyelesaian pengajuan paper tanah	3 Dokumen	1.480.515.363	3 Dokumen	60,00%	1.326.541.105				
12				Penyelesaian dokumen paper tanah	Jumlah dokumen hasil penyelesaian dokumen paper tanah	1 Dokumen	20.512.400	1 Dokumen	60,00%	11.492.241				1) Untuk paper tanah dengan jenis PMPD
13				Pengendalian pencairan dan pengajuan paper tanah	Jumlah dokumen hasil penyelesaian dan pencairan dan penyelesaian paper tanah	2 Dokumen	247.500.000	2 Dokumen	66,66%	202.148.100				
14				Finalisasi dan pengajuan permohonan akhir tanah	Jumlah laporan hasil pencairan dan penyelesaian pengajuan permohonan akhir tanah	1 Laporan	20.000.000	12 Laporan	60,00%	20.700.190				



**Tabel. 4.2**  
**Daftar inovasi Organisasi Perangkat Daerah Kota Jambi Tahun 2025**

No	Inovasi	Tahun	Nama OPD	Kategori Inovasi	Ringkasan Inovasi
1	E-SPTPD dan LIVE CHAT	2025	BPPRD	Tata Kelola Pemerintahan	Penambahan Fitur ini dalam aplikasi SIMPATTI ini bertujuan agar seluruh proses perpajakan bagi stakeholder menjadi praktis, ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel, serta dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak, mengakses informasi berbasis digital dalam upaya mendukung percepatan perluasan digitalisasi daerah dan meningkatkan kapasitas kemandirian fiskal di daerah khususnya pada pendapatan asli daerah Kota Jambi. Dengan adanya fitur ini akan mempermudah pelaporan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Khususnya PBB/PT Jasa Perhotelan, PBB/PT Makanan dan Minuman serta PBB/PT Kesenian dan Hiburan secara on line hal ini juga meminimalisir kesalahan tulis/hitung oleh wajib pajak serta memangkas waktu pelaporan pajak daerah yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun tanpa harus datang ke kantor BPPRD Kota Jambi dan juga BPPRD menyediakan akses layanan informasi dan pengaduan terkait pajak daerah yang dibutuhkan oleh wajib pajak secara mudah praktis dan ekonomis dengan respon time cepat dalam rangka meningkatkan kepuasan masyarakat/wajib pajak.

No	Inovasi	Tahun	Nama OPO	Kategori Inovasi	Pengukuran Inovasi
2	Percepatan Pelayanan Pengurusan dan Kemudahan Pembayaran Pajak BPHTB 2 x 24 Jam	2025	BPPRD	Tata Kelola Pemerintahan	Program inovasi ini bertujuan untuk penyederhanaan layanan BPHTB "Mudah, Cepat dan Membahagikan" dalam meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan masyarakat dalam bertransaksi yst BPHTB serta untuk mempercepat transaksi ekonomi di Kota Jambi, dimana dalam inovasi program tersebut diterapkan aspek-aspek yang menjadi dasar menetapkan nilai transaksi, yang mencakup Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau Nilai Transaksi Jual Beli dan Harga Nilai Pasar yang mencakup Zona Nilai Tanah (ZNT). Sistem Aplikasi Digital SIMPATI yang mana account tersebut dirancang terintegrasi antara PPAAT dengan BPPRD. Adapun manfaat dari inovasi ini adalah untuk mempercepat proses dan waktu layanan pengurusan serta kemudahan transaksi BPHTB, meminimalkan potensi jasa calo/pungutan liar dan kemudahan monitoring status permohonan BPHTB secara daring oleh wajib pajak maupun notaris/ppat.
3	Kring Kerja	2025	BPPRD	Tata Kelola Pemerintahan	Inovasi Kring Kerja sebagai upaya untuk mempermudah masyarakat/wajib pajak dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak daerah yang dapat diakses melalui aplikasi SIMPATI melalui link <a href="https://simpatijambikota.go.id/">https://simpatijambikota.go.id/</a> serta dapat di akses melalui media sosial Instagram, facebook dan hotline 08117400003 serta media sosial lainnya. pengembangan inovasi ini sebagai wujud komitmen BPPRD Kota Jambi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pelaporan dan pembayaran pajak daerah dalam mendukung reformasi birokrasi sebagai bentuk layanan digital komprehensif yang memerlukan keterpaduan pembangunan dan pengembangan SPBE baik instansi pusat maupun pemerintah daerah.

## PRESTASI BPPRD

1. Pemerintah Kota Jambi Meraih Penghargaan Terbaik 3 (tiga) Wilayah Sumatera TP2DD dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
2. Pemerintah Kota Jambi Meraih Penghargaan dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi sebagai Daerah dengan Transformasi Ekonomi Keuangan Digital Terbaik di Jambi.
3. BPPRD Meraih Terbaik 1 OPD dengan Kinerja Kerja Sama Terbaik di Lingkup Pemerintah Kota Jambi Tahun 2025.
4. BPPRD Meraih Peringkat 4 (empat) atas Inovasi Pelayanan Publik atas Inovasi PUTRI SELOKO dan Pelayanan BPHTB 2 x 24 Jam

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Laporan Tahunan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi tahun 2025 merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Tahunan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi ini dibuat bertujuan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.

Laporan Tahunan SKPD Tahun 2025 disusun sebagai bentuk penyediaan informasi dan pertanggungjawaban penyelenggaraan program dan kegiatan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi yang telah dilaksanakan pada tahun 2024. Selanjutnya laporan ini menjadi bahan bagi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

### 5.2 Saran

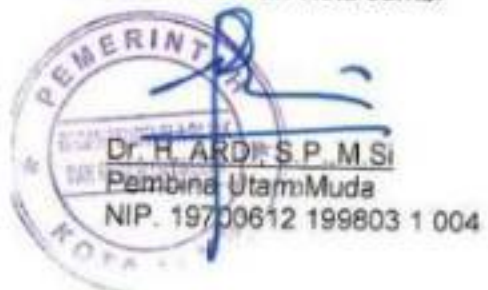
Beberapa saran untuk kemajuan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya sumber daya manusia yang mendukung dalam pelaksanaan perpajakan sehingga Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dapat mewujudkan Visi dan Misinya.
2. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik perlu tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang cukup.

Semoga Laporan Tahunan ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan tugas tugas dan fungsinya.

Jambi, Januari 2026

Kepala Badan Pengelola Pajak dan  
Retribusi Daerah Kota Jambi



Dr. H. ARDI S.P., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700612 199803 1 004

## FOTO PENGHARGAAN

- Pemerintah Kota Jambi Meraih Penghargaan Terbaik 3 (tiga) Wilayah Sumatera TP2DD dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian



- Pemerintah Kota Jambi Meraih Penghargaan dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi sebagai Daerah dengan Transformasi Ekonomi Keuangan Digital Terbaik di Jambi.



- BPPRD Meraih Terbaik Kedua atas Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terbaik dan atas Kinerja Pelampauan Pencapaian Realisasi Pajak Daerah Tahun 2025.



- BPPRD Meraih Terbaik 1 OPD dengan Kinerja Kerja Sama Terbaik di Lingkup Pemerintah Kota Jambi Tahun 2025.



- BPPRD Meraih Peringkat 4 (empat) atas Inovasi Pelayanan Publik



**PUTRI SELOKO**  
(PUsat InTegrasi SisteM peLayanan Online pajak kOta Jambi)  
**APLIKASI KRIING KOJA**



**Layanan Percepatan**  
**BPHTB 2 x 24 Jam**